

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19

Yusrina Hayfani

UIN Syarif Hidayatullah

Sintia

UIN Syarif Hidayatullah

Rismansyah Jatmiko

UIN Syarif Hidayatullah

Alamat: Jl. Ir. H. Juanda No 95, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten 15412

Korespondensi penulis: yusrinahayfanni@gmail.com

Abstract. *The Covid-19 pandemic that swept across the globe had a significant impact on Indonesia's economy. The purpose of this study is to compare the East Kalimantan Provincial Government's financial performance prior to and during the Covid-19 pandemic. The East Kalimantan Provincial Government's audited financial statements for the 2019 and 2020 fiscal years served as the secondary data for this descriptive quantitative study. Literature review was used as the data collection in this study. The East Kalimantan Provincial Government's overall financial performance in dealing with the Covid-19 pandemic is shown by the analysis of local government financial performance using financial ratios. The East Kalimantan Provincial Government has been able to maintain financial stability and maximize local revenue despite several financial aspects that have decreased and need to be improved, such as the efficiency of financial management, a more balanced allocation of expenditures between operational and capital, and regional growth that has decreased as a result of Covid-19.*

Keywords: Covid-19, Financial Performance, East Kalimantan.

Abstrak. Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebelum dan selama pandemi Covid-19. Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang telah diaudit untuk tahun fiskal 2019 dan 2020 digunakan sebagai data sekunder dalam penelitian kuantitatif deskriptif ini. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur secara keseluruhan dalam menghadapi pandemi Covid-19 ditunjukkan dengan analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan rasio keuangan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mampu menjaga stabilitas keuangan dan memaksimalkan pendapatan asli daerah meskipun terdapat beberapa aspek keuangan yang mengalami penurunan dan perlu ditingkatkan, seperti efisiensi pengelolaan keuangan, alokasi belanja yang lebih berimbang antara belanja operasional dan belanja modal, serta pertumbuhan daerah yang mengalami penurunan sebagai dampak dari Covid-19.

Kata kunci: Covid-19, Kinerja Keuangan, Kalimantan Timur.

Received April 12 30, 2023; Revised Mei 23, 2023; Accepted Juni 27, 2023

* Yusrina Hayfani, yusrinahayfanni@gmail.com

LATAR BELAKANG

Pandemi Covid-19 merupakan bencana yang melanda seluruh dunia dan telah mengguncangkan berbagai sektor kehidupan manusia. Salah satu sektor yang terdampak dari pandemi ini yaitu sektor perekonomian negara, termasuk Indonesia. Pandemi Covid-19 yang dimulai sejak awal tahun 2020 telah membuat stabilitas perekonomian dunia menjadi stagnasi dan negatif (Amal & Wibowo, 2022).

Di Indonesia, pandemi Covid-19 memengaruhi berbagai aspek kehidupan dan pemerintahan, salah satunya yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjadi salah satu daerah yang terkena dampak dari adanya pandemi ini yang mana dapat dilihat dari analisis kinerja keuangannya. Kinerja keuangan merupakan suatu gambaran kondisi keuangan suatu instansi yang dapat dianalisis menggunakan alat-alat analisis keuangan supaya dapat mendeteksi kekurangan dan prestasi yang dicapai dalam periode tertentu. Di dalam kinerja keuangan, informasi terkait laporan keuangan menjadi sangat penting karena dalam laporan tersebut dapat mengetahui posisi keuangan suatu instansi. Pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan (Esomar & Christianty, 2021).

Kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebelum pandemi yakni tahun 2019 dan selama pandemi yakni tahun 2020 mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan adanya penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disebabkan oleh adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama pandemi Covid-19. Adanya kebijakan PPKM menyebabkan terbatasnya kegiatan masyarakat seperti menurunnya daya beli masyarakat, ditutupnya pariwisata, pembatasan ekspor dan impor, hingga adanya kebijakan bekerja dari rumah.

Penelitian Sulistyono (2018) mengukur kinerja pengelolaan daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2009 hingga 2016 dengan menggunakan analisis rasio keuangan untuk melihat tingkat kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan menunjukkan kinerja yang cukup baik. Pemerintah provinsi tersebut telah menunjukkan peningkatan tingkat kemandirian, memiliki kemampuan dalam membiayai pembangunan daerah, serta efektif dalam mengelola keuangannya.

Penelitian Aryani (2022) menggunakan analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah DKI Jakarta sebelum dan selama pandemi tahun 2019 hingga 2020. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menunjukkan tingkat kemandirian yang sangat tinggi dengan pola hubungan delegatif baik sebelum maupun selama pandemi Covid-19. Meskipun demikian, pengelolaan pendapatan asli daerah masih perlu ditingkatkan agar lebih efektif, meskipun sudah efisien. Penggunaan dana juga sudah seimbang dengan berfokus pada belanja daerah

Penelitian Soraida (2022) mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin sebelum dan selama Covid-19 tahun 2018 hingga 2021 menggunakan analisis rasio keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin termasuk dalam kriteria efektif untuk rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2018, kriteria sangat efektif pada tahun 2019, kriteria kurang efektif pada tahun 2020, dan kriteria sangat efektif pada tahun 2021. Pada rasio kemandirian Pemerintah Kota Banjarmasin tahun 2018 termasuk kriteria kurang mandiri, tahun 2019 dengan kriteria cukup mandiri, tahun 2020 termasuk kriteria sedang, dan tahun 2021 dengan kriteria cukup mandiri. Dari hasil analisis kinerja keuangan tersebut, diharapkan Pemerintah Kota Banjarmasin dapat meningkatkan pendapatan asli daerah agar dapat memenuhi kebutuhan daerah dengan lebih mandiri.

Penulis belum menemukan studi yang secara khusus membahas perbedaan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebelum dan selama pandemi Covid-19. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai evaluasi kinerja keuangan daerah di Indonesia. Selain itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memahami dampak Covid-19 terhadap kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan dapat menjadi panduan bagi pemerintah agar dapat mengelola keuangan secara efektif dalam kondisi serupa di masa yang akan datang.

KAJIAN TEORITIS

Keuangan Daerah

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan melalui pelayanan masyarakat di daerah, keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting sehingga memerlukan pengelolaan yang efektif dan efisien. (Sulistyo, 2018). Keuangan daerah melibatkan pengelolaan pendapatan,

pengeluaran, dan aset keuangan yang diperoleh serta digunakan oleh pemerintah daerah untuk menyediakan layanan publik kepada penduduk setempat.

Adapun sumber pendapatan utama pemerintah daerah berasal dari pajak daerah, transfer dana dari pemerintah pusat, pendapatan asli daerah (PAD), dan dana perimbangan. Dan pengeluaran pemerintah daerah meliputi berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, transportasi, keamanan, pengembangan ekonomi, dan administrasi pemerintahan. Pemerintah daerah juga dapat melakukan investasi dalam pengembangan berbagai proyek strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Konsep Keuangan Daerah

Definisi Keuangan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. adalah sebagai dana atau kekayaan yang dikelola menggunakan peraturan daerah setempat. Konsep keuangan daerah mengacu pada pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau pemerintahan lokal, seperti pemerintah kota, pemerintah kabupaten, atau pemerintah provinsi. Konsep ini berkaitan dengan pendapatan, pengeluaran, dan pengelolaan anggaran serta aspek-aspek keuangan lainnya yang terkait dengan otonomi keuangan daerah (Yulinchton et al., 2022).

Adapun tujuan utama dari konsep ini, yaitu untuk menciptakan kemandirian keuangan daerah dan memastikan penggunaannya efektif dan efisien dalam mencapai pembangunan daerah yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dari sumber daya keuangan yang tersedia.

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja merupakan pencapaian atas sesuatu yang telah direncanakan oleh seseorang atau organisasi. Jika hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan, maka kinerja dianggap baik. Kinerja dikatakan sangat baik jika pencapaian lebih dari tujuan yang telah direncanakan, sedangkan kinerja dapat dikatakan buruk apabila mendapat pencapaian lebih rendah dari tujuan (Sulistyo, 2018). Pengukuran kinerja dapat digunakan untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian antara kinerja yang diharapkan dengan kinerja aktual.

Rasio Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi merujuk pada tingkat kebebasan dan kemandirian yang dimiliki oleh unit-unit atau entitas-entitas yang terlibat dalam suatu sistem atau organisasi (Hafizi &

Amalia, 2022). Semakin tinggi derajat desentralisasi, maka semakin besar wewenang dan keputusan yang diberikan kepada unit-unit atau entitas-entitas tersebut.

Jadi, rasio ini menunjukkan sejauh mana pemerintah pusat telah mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab pembangunan kepada pemerintah daerah. Rasio ini juga seringkali digunakan untuk mengukur tingkat otonomi daerah dalam mengambil keputusan dan mengelola sumber daya wilayah. Rasio ini juga menunjukkan sejauh mana kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah.

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 1. Skala Rasio Derajat Desentralisasi

Persentase Derajat Desentralisasi	Kemampuan Keuangan Daerah
00,00 – 10,00%	Sangat Kurang
10,01% – 20,00%	Kurang
20,01% – 30,00%	Cukup
30,01% – 40,00%	Sedang
40,01% – 50,00%	Baik
> 50,00%	Sangat Baik

Sumber : Purba & Hutabarat (2017)

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio ini mencerminkan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan dan menghasilkan sumber daya secara internal, tanpa perlu bergantung pada sumber daya eksternal atau transfer dari pemerintah pusat (Drastiana & Himmati, 2021).

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Pembiayaan}} \times 100\%$$

Tabel berikut menunjukkan tingkat kemandirian, kriteria, dan kemampuan keuangan pemerintah daerah.

Tabel 2. Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% – 25%	Instruktif
Rendah	25% – 50%	Konsultatif
Sedang	50% – 75%	Partisipatif
Tinggi	75% – 100%	Delegatif

Sumber: Halim & Kusufi (2007)

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai pendapatan asli daerah yang telah ditetapkan (Baso et al., 2020). Salah satu cara untuk mengukur keberhasilan pemerintah dalam menjalankan tugasnya adalah dengan mengukur

efektivitas pendapatan asli daerah. Nilai efektivitas yang lebih rendah mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah daerah yang kurang optimal, sedangkan nilai efektivitas yang lebih tinggi mengindikasikan bahwa pemerintah lebih mampu dalam meningkatkan PAD.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 3. Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Rasio Efektivitas Keuangan Daerah	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90% – 100%	Efektif
80% – 90%	Cukup Efektif
60 – 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber: Halim & Kusufi (2007)

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi membandingkan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan dengan pendapatan yang terealisasi. Rasio efisiensi menggambarkan sejauh mana Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran dan sumber daya lainnya untuk memberikan layanan publik yang efektif. Berbeda dengan rasio efektivitas, kemampuan kinerja pengelolaan keuangan daerah dikatakan efisien jika mencapai rasio kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Jadi, semakin kecil nilai rasio ini, maka kinerja pengelolaan keuangan daerahnya semakin baik (Baso et al., 2020).

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah	Kriteria
> 100%	Tidak Efisien
90% – 100%	Kurang Efisien
80% – 90%	Cukup Efisien
60 – 80%	Efisien
< 60%	Sangat Efisien

Sumber: Halim & Kusufi (2007)

Rasio Keserasian

Rasio keserasian mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana secara optimal ke belanja operasi serta belanja modal. (Baso et al., 2020). Rasio keserasian daerah merupakan indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana keseimbangan tercapai antara berbagai aspek penting dalam suatu wilayah, seperti penggunaan

lahan, infrastruktur, jumlah penduduk, kegiatan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kebutuhan sosial. Rasio keserasian dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi Terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Pertumbuhan PAD

Pertumbuhan mengacu pada kondisi terjadi perbaikan atau perkembangan yang berguna untuk menilai apakah suatu pemerintah daerah mengalami pertumbuhan positif atau negatif dalam pendapatan atau pengeluaran pada tahun tertentu (Aurin et al., 2023). Rasio ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan pencapaian yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya.

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PAD tahun } t - \text{PAD tahun } t - 1}{\text{PAD tahun } t - 1} \times 100\%$$

Tabel 5. Kriteria Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Skala Interval Rasio Pertumbuhan Pendapatan	Kemampuan Pertumbuhan Pendapatan
0% – 25%	Rendah
25% – 50%	Sedang
50% – 100%	Tinggi

Sumber: Andriyani & Handayani, (2022)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam deskriptif kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu tertentu yang akan menjawab permasalahan yang diteliti. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan yang diperoleh dari situs resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2019 dan 2020 yang telah diaudit. Pemilihan sampel dilakukan karena pada penelitian ini difokuskan untuk melakukan analisis kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebelum dan selama Covid-19.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kajian literatur dengan mengumpulkan data melalui sumber-sumber seperti buku, jurnal, tesis, situs resmi, dan sumber informasi lain yang relevan dengan judul penelitian. Analisis data dilakukan dengan

menggunakan rasio keuangan seperti, derajat desentralisasi, rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, serta rasio pertumbuhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio Derajat Desentralisasi

Tabel berikut menunjukkan hasil perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 6. Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Tahun 2019 – 2020

Keterangan	Tahun	
	2019	2020
Pendapatan Asli Daerah	Rp6.555.852.805.408	Rp5.289.232.781.584
Total Pendapatan Daerah	Rp11.775.086.446.200	Rp10.133.115.629.661
Rasio Desentralisasi	55,68%	52,20%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan otonomi daerah dengan baik, ditunjukkan oleh kemampuan keuangan daerah yang termasuk dalam kriteria sangat baik dari tahun 2019 hingga 2020. Rasio derajat desentralisasi pada tahun 2019 adalah 55,68%, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 52,20%. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2020, kemampuan keuangan daerah masih tergolong sangat tinggi karena melebihi 50%. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pandemi Covid-19 tidak memengaruhi secara signifikan kemampuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menjaga kontribusi pendapatan asli daerahnya.

Rasio Kemandirian

Tabel berikut menunjukkan hasil perhitungan Rasio Kemandirian Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 7. Perhitungan Rasio Kemandirian Tahun 2019 – 2020

Keterangan	Tahun	
	2019	2020
Pendapatan Asli Daerah	Rp6.555.852.805.408	Rp5.289.232.781.584
Transfer pusat	Rp5.204.311.550.792	Rp4.831.866.273.077
Pinjaman/Pembiayaan	Rp1.861.926.227.625	Rp2.149.383.814.348
Rasio Kemandirian	92,78%	75,76%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki tingkat rasio kemandirian yang tinggi dengan pola hubungan yang bersifat delegatif. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah sudah mampu menjalankan otonomi daerah. Pada tahun 2019, rasio kemandirian daerah mencapai 92,78%, mengindikasikan tingkat keuangan daerah yang tinggi. Namun, terjadi penurunan signifikan sebesar 17,02% pada tahun 2020, dengan rasio kemandirian mencapai 75,76%. Penurunan ini menandakan bahwa saat pandemi tahun 2020, kemandirian keuangan daerah Kalimantan Timur terganggu. Meskipun pada tahun tersebut masih tergolong dalam kategori kemandirian keuangan yang tinggi, tetapi menunjukkan adanya pembiayaan dari eksternal yang cukup besar.

Rasio Efektivitas

Tabel berikut menunjukkan hasil perhitungan Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 8. Perhitungan Rasio Efektivitas Tahun 2019 – 2020

Keterangan	Tahun	
	2019	2020
Realisasi Penerimaan PAD	Rp6.555.852.805.408	Rp5.289.232.781.584
Target Penerimaan PAD	Rp5.794.714.345.762	Rp4.326.324.617.227
Rasio Efektivitas	113,14%	122,26%

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa terjadi penurunan pada target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2019 ke 2020. Meskipun mengalami penurunan target dan realisasi penerimaan PAD, hasil perhitungan rasio efektivitas penerimaan PAD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tetap berada dalam kriteria sangat efektif karena mencapai rasio efektivitas di atas 100%. Adapun peningkatan rasio efektivitas dari sebelumnya sebesar 113,14% pada tahun 2019 menjadi 122,26% pada tahun 2020. Kedua rasio tersebut termasuk dalam kriteria sangat efektif. Analisis rasio ini mengindikasikan kemampuan yang sangat baik dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mengoptimalkan penerimaan PAD selama pandemi Covid-19.

Rasio Efisiensi

Tabel berikut menunjukkan hasil perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 9. Perhitungan Rasio Efisiensi Tahun 2019 – 2020

Keterangan	Tahun	
	2019	2020
Realisasi Belanja Daerah	Rp6.488.228.331.289	Rp5.917.231.922.644
Realisasi Pendapatan Daerah	Rp6.555.852.805.408	Rp5.289.232.781.584
Rasio Efisiensi	98,97%	111,87%

Tabel tersebut mengindikasikan adanya penurunan dalam belanja dan pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020. Namun, perlu diperhatikan bahwa penurunan tersebut tidak selalu berarti positif. Dalam analisis rasio efisiensi, terlihat bahwa pada tahun 2019, Provinsi Kalimantan Timur memiliki rasio efisiensi sebesar 98,97%, yang mana menunjukkan tingkat efisiensi keuangan yang kurang efisien. Situasi semakin memburuk pada tahun 2020 dengan rasio efisiensi mencapai 111,87%. Hal ini mengindikasikan kinerja keuangan yang tidak efisien akibat realisasi belanja yang melebihi pendapatan yang diterima. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diharapkan dapat mengurangi belanja dengan menyesuaikan pendapatan yang dimiliki untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Rasio Keserasian

1. Belanja Operasi

Tabel berikut menunjukkan hasil perhitungan Rasio Belanja Operasi Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 10. Perhitungan Rasio Belanja Operasi Tahun 2019 – 2020

Keterangan	Tahun	
	2019	2020
Total Belanja Operasi	Rp5.279.509.080.054	Rp4.624.449.956.327
Total Belanja Daerah	Rp6.488.228.331.289	Rp5.917.231.922.644
Rasio Belanja Operasi	81,37%	78,15%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diperoleh bahwa sebagian besar dana yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dialokasikan pada pengeluaran untuk kebutuhan belanja daerah. Tingkat belanja operasi mengalami penurunan pada tahun 2020 dari yang sebelumnya sebesar 81,37% menjadi 78,15% dari total belanja daerah.

2. Belanja Modal

Tabel berikut menunjukkan hasil perhitungan Rasio Belanja Modal Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 11. Perhitungan Rasio Belanja Modal Tahun 2019 – 2020

Keterangan	Tahun	
	2019	2020
Total Belanja Modal	Rp1.207.815.521.798	Rp1.066.605.762.730
Total Belanja Daerah	Rp6.488.228.331.289	Rp5.917.231.922.644
Rasio Belanja Modal	18,62%	18,03%

Berdasarkan tabel di atas, terjadi sedikit penurunan pada belanja modal yang ditunjukkan dari penurunan rasio tahun 2019 sebesar 18,62% menjadi 18,03% pada tahun 2020. Dengan demikian, secara umum belanja daerah masih didominasi oleh belanja operasional dibandingkan belanja modal yang memiliki proporsi yang relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur masih mengalokasikan sebagian besar dananya untuk pengeluaran rutin, sedangkan alokasi pengeluaran yang memiliki manfaat jangka panjang memiliki porsi yang lebih kecil.

Rasio Pertumbuhan

Tabel berikut menunjukkan hasil perhitungan Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 12. Perhitungan Rasio Pertumbuhan Tahun 2019 – 2020

Keterangan	Tahun		
	2018	2019	2020
Pendapatan Asli Daerah	Rp5.800.270.285.305	Rp6.555.852.805.408	Rp5.289.232.781.584
Rasio Pertumbuhan		13,03%	-19,32%

Berdasarkan tabel tersebut, terdapat pertumbuhan yang signifikan dalam pendapatan asli daerah antara tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2019, pendapatan asli daerah menunjukkan kinerja keuangan yang positif karena mengalami peningkatan sebesar 13,03% dari Rp5.800.270.285.305 menjadi Rp6.555.852.805.408.

Namun, pada tahun 2020, terjadi penurunan yang cukup signifikan dengan pertumbuhan negatif sebesar -19,32% dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau turun menjadi Rp5.289.232.781.584. Dampak pandemi Covid-19 secara signifikan mempengaruhi

perekonomian dan pendapatan asli daerah. Pertumbuhan negatif ini menunjukkan dampak pandemi Covid-19 terhadap kondisi keuangan daerah, termasuk pendapatan asli daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap perhitungan rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebelum dan selama pandemi Covid-19, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tergolong baik. Rasio derajat desentralisasi menunjukkan tingkat yang sangat tinggi. Rasio kemandirian tergolong tinggi dengan pola hubungan delegatif, rasio efektivitas PAD tergolong sangat efektif, dan rasio efisiensi menunjukkan kurang efisiennya pemerintah daerah akibat realisasi belanja lebih besar daripada pendapatan yang diterima.

Di samping itu, rasio keserasian belanja operasi lebih mendominasi belanja daerah dibandingkan rasio belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan dananya lebih besar untuk pengeluaran rutin dibandingkan pengeluaran yang memiliki manfaat jangka panjang. Selain itu, rasio pertumbuhan tahun 2019 sampai 2020 mengalami penurunan yang signifikan hingga mencapai -19,32% pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pandemi Covid-19 ini mempengaruhi perekonomian dan pendapatan asli daerah sehingga berpengaruh terhadap kondisi keuangan daerah.

Secara keseluruhan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menunjukkan kinerja keuangan yang baik dalam menghadapi tantangan pandemi Covid-19. Meskipun terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, seperti efisiensi pengelolaan keuangan dan alokasi belanja yang lebih seimbang antara operasional dan modal, pemerintah daerah tetap mampu menjaga stabilitas keuangan dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah.

DAFTAR REFERENSI

- Amal, M. I., & Wibowo, P. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 4(1), 183–193. <https://doi.org/10.31092/JPKN.V4I1.1723>
- Andriyani, D., & Handayani, S. W. (2022). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(3), 53–63. <https://doi.org/10.56127/jukim.v1i03.106>
- Aryani, H. F. (2022). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI COVID-19. *MIZANIA: Jurnal*

Ekonomi Dan Akuntansi, 147–156.
<http://journal.unusia.ac.id/index.php/MIZANIA/article/view/508>

- Aurin, R., Sam, I., & Rahayu, R. (2023). Analisis Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2019-2021. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(4), 1545–1557.
- Baso, R., Wahyuni, N., & Sumarni, S. (2020). Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba. *Tangible Journal*, 5(1), 43–57. <https://doi.org/10.53654/tangible.v5i1.103>
- Drastiana, T., & Himmati, R. (2021). Analisis Rasio Keuangan Sebagai Alat Penilaian Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dan Provinsi Jawa Tengah Pada Tahun 2019-2020. *Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis Islam (SOSEBI)*, 1(1), 51–65. <https://doi.org/10.21274/sosebi.v1i1.4915>
- Esomar, M. J., & Christianty, R. (2021). Dampak pandemi covid-19 terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor jasa di BEI. *Jkbn (Jurnal Konsep Bisnis Dan Manajemen)*, 7(2), 227–233. <https://doi.org/10.31289/jkbn.v7i2.5266>
- Hafizi, R., & Amalia, F. A. (2022). Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 5(2), 116–130.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur. (2020). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2019 Audited*.
- Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur. (2021). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2020 Audited*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Purba, S., & Hutabarat, R. C. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Dairi. *Jurnal Ilmiah Kohesi*, 1(1).
- Soraida, S. (2022). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kota banjarmasin sebelum dan selama pandemi. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 1(2), 78–82. <https://doi.org/10.56127/jekma.v1i2.154>
- Sulistyo, A. T. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. *Indonesia Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 43–59. <https://doi.org/10.33105/itrev.v3i1.22>
- Yulinchton, M. R., Ariani, M. B. N., & Triwahyuningtyas, N. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Tegal Periode 2016-2019. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 11(2), 303–314. <https://doi.org/10.30588/jmp.v11i2.893>